

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara 1* (2006).
- Cogan, Dominic de, and Peter Haris. *Tax Justice and Tax Law: Understanding Unfairness in Tax Systems*. Great Britain: Hart Publishing, 2020.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuki. *Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara*. Jakarta: DDTC (PT Dimensi Internasional Tax), 2023.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. "Laporan Perkembangan Peradilan Militer Sebelum dan Sesudah Satu Atap Dengan MA RI," 2008.
- Dubroff, Harold, and Brant J Hellwig. *The United States Tax Court*. Second. Washington, D.C.: United States Tax Court, 2014.
- Harwati, Tuti. *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil, 2015.
- Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda, 2007.
- Malimar. *101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak dalam Upaya Menegakkan Keadilan Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Kesembilan. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Sadhani, Djazoeli, Syahriful Anwar, dan K. Subroto. *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*. Jakarta: PT Gemilang Gagasindo Handal, 2008.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: KY, 2018.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam: Pengadilan Khusus*. Jakarta: Pusat Analissi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Arah Manajemen*

Shetreet, Shimon. "Judicial Independence and Accountability: Core Values in Liberal Democracies." In *Judiciaries in Comparative Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Shetreet, Shimon. "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges." in *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, eds. Shimon Shetreet and Jules Deschênes (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2008.

Soemitro, Rochmat. *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1991.

Solikhin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.

Sumardjono, Maria S.W. *Metodologi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.

### **Artikel, Karya Ilmiah, dan Laporan Penelitian**

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 1 (2012).

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. "Pengadilan Pajak Di Bawah Dua Atap." *Majalah Mahkamah Agung*, 2021.

Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat MA Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) TA. 2023: Program Dukungan Manajemen DIPA 01 pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan*. (Jakarta: Sekretariat MA RI, 2023).

Borman, M. Syahrul. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).

Bravestha, Rio, Rio Bravestha, Syofyan Hadi, Syofyan Hadi, and Syofyan Hadi. "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Null*, 2017.

Candra, Mardi. "Eksistensi Pengadilan Agama Pasca Penyatuan Satu Atap (Independensi Dan Pengembangannya)." *Audito Comparative Law Journal* 1, no. 1 (2020).

Chumairoh, Lisatul. "Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022).

Devitasari, Ananthia Ayu. "Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca

Dingake, Oagile Bethuel Key. *Judges*. Notion Press, 2020.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. “Laporan Perkembangan Peradilan Militer Sebelum Dan Sesudah Satu Atap Dengan MA RI,” 2008.

Edy, Slamet Sarwo. “Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017).

Enggarani, Nuria Siswi. “Independensi Peradilan dan Negara Hukum.” *Jurnal Law and Justice* 3, no. 2 (2019).

Fahmiron. “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Litigasi* 17, no. 2 (2016).

Febriani, Sabila. “Eksistensi dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023).

Greggi, Marco, and Anna Miotto. “The OECD Dispute Resolution System in Tax Controversies.” *Laws* 13, no. 4 (2024).

Hanah, Siti. “Reformasi Peradilan Agama di Indonesia (Kajian Atas Pemberlakuan Sistem Satu Atap Lembaga Peradilan Dibawah Mahkamah Agung).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 52, no. 2 (2018).

Kokott, J, P Pistone, and R Miller. “Public International Law and Tax Law: Taxpayers’ Rights.” *Georgetown Journal Of International Law* 52 (2021).

Laro, David. “The Evolution of the Tax Court as an Independent Tribunal.” *University of Illinois Law Review* 1995, no. 1 (1995).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Laporan Tahunan 2024: Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas.” Jakarta, 2024.

Mahkamah Agung, “Kelembagaan dan Pelaksanaan Fungsi Kasasi Hoge Raad Der Nederlanden (Pembatas Perkara, Implementasi, dan Manajemen Pengetahuan),” Laporan Hasil “MA to HR” Visit Mission 2015, 2017, dan 2018 serta Perkembangan-perkembangan Lainnya di Hoge Raad.

Maysarah, Andi. “Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Warta* 11, no. April (2017).

Mazza, Stephen W., and Tracy A. Kaye. “Restricting the Legislative Power to Tax in the United States.” *American Journal of Comparative Law* 54 (2006).

Muhasan, Imam. “Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak dalam Lapangan Hukum di Indonesia: Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 1, no. 1 (2017).

Mulroney, Michael. “Point and Counterpoint: Should Experience in Tax Practice Be a

Prerequisite for a Positive Tax Section Recommendation for Appointment to the U.S. Tax Court?” *ABA Section of Taxation News Quarterly* 2003 22, no. 4 (2003).

Nathaniel, Antonius Adrian. “Analisis Penyatuatan Pembinaan Pengadilan Pajak Di Bawah MA Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023.” Universitas Indonesia, 2024.

Parakas, Mario. “Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim.” *Pengadilan Negeri Argamakmur*, 2012.

Pickstone, David. “Tax Disputes and Litigation Review and Litigation,” 2022.

Purindrasari, Fara Cahya, and Talitha Hafiz Zain. “Jaminan Keamanan Hakim Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan.” *Soedirman Law Review* 6, no. 1 (2024).

Puslitbang Hukum dan Peradilan. “Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Facti: Pengkajian Asas, Teori, Norma Dan Praktek.” MA RI, 2011.

Riza, Dola. “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018).

Rositawati, D. “Judicial Governance in Indonesia: Judicial Independence under the One Roof System,” 2019.

Sa’adah, Nabitatus, and Kadek Cahya Susila Wibawa. “Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023).

Saka Marlinang Nainggolan. “Legal Certainty of Article 36 Paragraph (1) Letter a of the Law on General Provisions and Tax Procedures as an Effort to Prevent Disparity in Tax Court Decisions.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023).

Situmeang, Tomson. “Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022).

Sunstein, Cass R. “Separation of Powers Is A They, Not An It.” *Harvard Journal of Law & Public Policy* 239, no. 1992 (2005).

Suoth, Tirzha Carolaine Priska. “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Antara Wajib pajak Dengan Pemungut Pajak Untuk Memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.” *Jurnal Lex Et Societatis* VI, no. 9 (2018).

Suciyani, Fitri. “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Dharmasiswa* 2. no. 1 (2022).

Susena, Karona Cahya, Suwarni Suwarni, and Joko Widiyanto. “Hubungan Self Assesment System Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (2018).

Werdiningsih, Mega Ayu. “Model Pengawasan Hakim Pada Pengadilan Pajak Di Indonesia.” (Universitas Indonesia, 2022).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 257).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 257).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada MA Republik Indonesia.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Staatsblad Tahun 1933 Nomor 6.

*Ordonantie Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 707.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 perkara PT. Apota Wibawa Pratama diwakili Ir. Cornelio Moningka Vega (Pemohon), 13 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 perkara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak (Para Pemohon), 4 Agustus 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 perkara Haposan Lumbas Gaol (Pemohon I), Triyono Martanto (Pemohon II), dan Redno Sri Rezeki (Pemohon III), 8 September 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 perkara Nurhidayat (Pemohon I), Allan Fatchan Gani Wardhana (Pemohon II), dan Yuniar Riza Hakiki (Pemohon III), 25 Mei 2023.

### **Lain-lain**

General Assembly. "Basic Principles on the Independence of the Judiciary." Milan, 1985.

International Bar Association. "IBA Minimum Standards of Judicial Independence," 1982.

Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak Nomor 08/KS-KY/VII/200, Komisi Yudisial.

Nota Kesepahaman Bersama tentang Nomor 1135/KMA/SKB/VII/2010, Mahkamah Agung.

Nota Kesepahaman Bersama tentang Nomor MOU-1681/MK/2010, Kementerian Keuangan.



## Internet

Badilum MA, "Dirjen Badilum: Penyusunan Anggaran di Pengadilan Harus Bertanggung Jawab dan Berkualitas," diakses pada tanggal 24 Februari 2025 melalui <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/3994-dirjen-badilumpenyusunan-anggaran-harus-bertanggung-jawab.html>.

Centre for Tax Policy and Administration OECD, "Taxpayers' Rights and Obligations - Practice Note," diakses pada tanggal 5 Maret 2025 di [https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/dipartimento\\_pol\\_fisc/ocse.pdf](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/dipartimento_pol_fisc/ocse.pdf).

Hukumonline. "Membongkar Kasus Gayus, Momentum Penataan Sistim Perpajakan," 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membongkar-kasus-gayus-momentum-penataan-sistim-perpajakan-lt4bc6e15ab2dad/?page=all>.

Hukumonline. "Pengadilan Pajak Diduga Jadi Tempat Subur Penyuapan." Diakses pada tanggal 4 Maret 2025 di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-pajak-diduga-jadi-tempat-subur-penyuapan-lt4bc8577e2d336/>.

Nur Syarifah, "Pengaturan Jabatan Hakim Untuk Menciptakan Independensi Peradilan," December 8, 2015, diakses pada tanggal 2 Januari 2025 melalui <https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/>.

Mochamad Januar Rizki, "Hari Perdana Mogok Kerja, Para Hakim Sodorkan 3 Tuntutan ke MA," diakses pada tanggal 24 Februari 2025 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/hari-perdana-mogok-kerja--para-hakim-sodorkan-3-tuntutan-ke-ma-lt67038e5bda4ff/>.

Munawaroh, Nafiatul. "7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." Hukumonline, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-asas-hukum-acara-peradilan-tata-usaha-negara-lt62d5370e455c4/>.

Rahmawati, Dwi. "MA Kena Efisiensi Anggara Rp 2,2T: Transportasi Hakim Terdampak," diakses pada tanggal 24 Februari 2025 melalui <https://news.detik.com/berita/d-7775810/ma-kena-efisiensi-anggaran-rp-2-2-t-transportasi-hakim-terdampak>.

Redaksi DDTC News. "Lokasi Sidang Pengadilan Pajak Bakal Ditambah, Medan Jadi Sasaran," diakses pada tanggal 3 Januari 2025 di <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805275/lokasi-sidang-pengadilan-pajak-bakal-ditambah-medan-jadi-sasaran>.

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. "Statistik Penyelesaian Sengketa 2019-2023," <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

STH Indonesia Jentera, "Peran dan Masa Depan Pengadilan Pajak", webinar (2023), diakses pada tanggal 24 Februari 2024 di <https://youtu.be/swOzVfesu7A>.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Syarifah,

**Analisis Penyatuan Atap Pengadilan Pajak terhadap Independensi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah**

**Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023**

Pramita Putri Rahmadhani, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Nur. “Pengaturan Jabatan Hakim Untuk Menciptakan Independensi Peradilan”. Diakses pada tanggal 3 Januari 2025 di <https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakanindependensi-peradilan/>.